



Pendampingan dalam Membangun Sistem Akuntansi Sederhana Bagi UMKM di Kecamatan Leuwiliang

Abdul Aziz¹, Siti Purnama Sari¹

¹Institut Ummul Quro Al Islami Bogor, Indonesia

ARTICLE INFO

Volume 11 Issue 2 (August 2025) e-ISSN 2550-1143 doi: 10.30997/qh.v11i2.21202	Corresponding Author: Nama Abdul Aziz abdul.aziz@iuqibogor.ac.id	Article history: Received: 07-31-2025 Accepted: 08-10-2025 Available online: 08-13-2025
--	---	---

How to Cite:

Aziz, A., & Sari, S. P. (2025). Pendampingan dalam Membangun Sistem Akuntansi Sederhana Bagi UMKM di Kecamatan Leuwiliang. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 270-285.
<https://doi.org/10.30997/qh.v11i2.21202>

ABSTRACT

This community service program aims to improve the financial management capacity of food MSMEs in Leuwiliang District through a Participatory Action Research (PAR) approach. This method actively involves MSME actors in identifying problems, designing a simple accounting system, and joint implementation and evaluation. The results of the community service indicate that the PAR approach is effective in improving financial literacy, the implementation of daily transaction recording, and the ability to prepare basic financial statements such as income statements and cash flow statements. The mentoring also enhances SMEs' access to financing and strengthens business efficiency. Dissemination is conducted through local-language visual and digital media to expand the educational impact. In conclusion, the participatory approach has proven to build financial independence and create a sustainable community learning ecosystem in support of local economic resilience. **Keywords:** economic empowerment, financial literacy, participatory action research, simple accounting, smes.

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM makanan di Kecamatan Leuwiliang melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode ini melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam identifikasi masalah, perancangan sistem akuntansi sederhana, serta implementasi dan evaluasi bersama. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan PAR efektif dalam meningkatkan literasi keuangan, penerapan pencatatan transaksi harian, serta kemampuan menyusun laporan keuangan dasar seperti laba rugi dan arus kas. Pendampingan juga meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan memperkuat efisiensi usaha. Diseminasi dilakukan melalui media visual dan digital berbahasa lokal untuk memperluas dampak edukatif. Kesimpulannya, pendekatan partisipatif terbukti membangun kemandirian finansial dan menciptakan ekosistem pembelajaran komunitas yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan ekonomi lokal.

Kata kunci: akuntansi sederhana, literasi keuangan, *participatory action research*, pemberdayaan ekonomi, umkm.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/QH/>

Copyright (c) 2025 by Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat



1. Pendahuluan

Kecamatan Leuwiliang merupakan salah satu konsentrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor per tahun 2023, terdapat 1.874 UMKM di Kecamatan Leuwiliang, dengan dominasi sektor perdagangan (42,3%), sektor manufaktur (27,5%), dan sektor jasa (18,2%) (BPS Bogor, 2023). Meski jumlahnya besar, sebagian besar UMKM di wilayah ini masih menghadapi permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan, di mana 78,6% pelaku usaha tidak memiliki pencatatan keuangan yang akurat dan 83,2% belum memisahkan dana usaha dengan dana pribadi secara jelas (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Situasi ini diperburuk oleh tingkat literasi keuangan pelaku UMKM pedesaan di Leuwiliang yang relatif rendah, yaitu hanya 56,7%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 67,8% (OJK, 2023). Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan formal, mengembangkan usaha, serta meningkatkan daya saing produk mereka di tengah situasi pasar yang semakin kompetitif.

Permasalahan terbatasnya akses bantuan keuangan bagi UMKM di Kecamatan Leuwiliang mencerminkan kesenjangan literasi keuangan yang mengkhawatirkan dari perspektif ekonomi mikro Islam. Rendahnya persentase UMKM yang memiliki pembukuan keuangan memadai (12,3%) sejalan dengan penelitian Arif yang menyoroti transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai ekspektasi utama untuk mewujudkan keadilan ekonomi berbasis syariah (Al Arif, 2023). Latar belakang di mana 87,7% UMKM masih menggunakan cara lama dalam pencatatan keuangan mencerminkan apa yang disebut sebagai “hambatan struktural dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi kolektif” (Lahamid, 2018). Gigih berpendapat bahwa masyarakat dengan literasi keuangan tinggi (65% responden) memiliki pendapatan lebih besar daripada yang literasinya rendah, menunjukkan link antara literasi dan kesejahteraan ekonomi (Gigih et al., 2023). Meskipun literasi dalam populasi pedesaan relatif tinggi, namun mayoritas Masyarakat lainnya di pedesaan bisa berada di bawah rata-rata nasional.

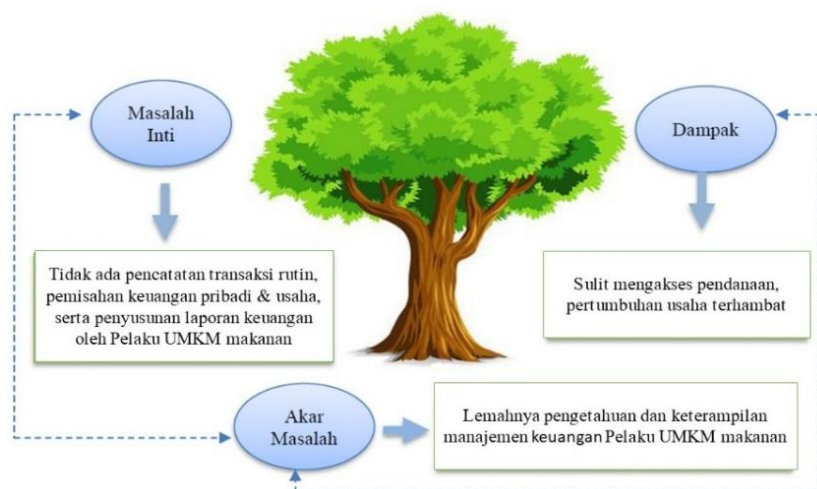
Berdasarkan bukti empiris dan penelitian lapangan, permasalahan pengelolaan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti nyata dan meluas. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah ketidakteraturan dalam pencatatan keuangan, yang masih dilakukan secara manual. Hal ini dibuktikan dengan temuan empiris dari riset OCBC Indonesia, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha hanya mencatat transaksi dalam jumlah besar, sesekali, atau hanya mengandalkan ingatan. Tindakan ini menghambat akurasi pemantauan kondisi keuangan usaha dan berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan pelaku usaha. Selain itu, pemisahan antara dana pribadi dan dana perusahaan masih menjadi tantangan utama bagi UMKM skala mikro. Mayoritas pelaku usaha hanya memiliki satu rekening untuk kebutuhan pribadi dan bisnis, sehingga aliran kas sulit dilacak dan analisis keuangan menjadi tidak jelas. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar UMKM tidak memiliki laporan keuangan resmi seperti laporan laba rugi

atau laporan arus kas, padahal dokumen ini sangat penting dalam proses pengajuan pembiayaan dan ekspansi usaha (Mutiah, 2019; Rahman, 2024; Rahman Hakim et al., 2024).

Meskipun telah ada beberapa studi yang meneliti peran sistem akuntansi bagi UMKM, masih sangat sedikit literatur yang membahas pendekatan partisipatif kontekstual dalam mengembangkan sistem akuntansi sederhana di wilayah pedesaan. Data statistik menunjukkan kondisi yang memprihatinkan di Kecamatan Leuwiliang, di mana 78,6% pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik dan 83,2% tidak dapat memisahkan dana usaha dari dana pribadi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023), sementara tingkat literasi keuangan yang hanya 56,7% jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 67,8% (OJK, 2023).

Soedarwo telah menekankan efektivitas metode Participatory Action Research (PAR) dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kemudian Purwanti dan Yuliati menyoroti pentingnya transparansi keuangan sebagai kebutuhan utama dalam pengembangan usaha. Namun demikian, belum ada strategi bantuan partisipatif yang dirancang untuk membangun sistem pembukuan sederhana yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi UMKM di daerah pedesaan (Purwanti & Yuliati, 2022; Soedarwo et al., 2022).

Kajian Purwanti dan Yuliati tentang “hambatan struktural” serta pengamatan Soedarwo terkait hubungan positif antara pendampingan keuangan dan kesejahteraan masyarakat juga belum berhasil mengintegrasikan proses partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM sebagai perancang bersama dari sistem akuntansi yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kebutuhan akan riset ini semakin mendesak mengingat hanya 23,4% UMKM lokal yang menerima kredit dari bank, yang secara langsung menghambat kemampuan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan Leuwiliang (Makki, 2022; Purwanti & Yuliati, 2022; Soedarwo et al., 2022).



Gambar 1 Pohon masalah pengabdian

Intervensi yang paling tepat untuk mengatasi hambatan akses UMKM terhadap bantuan keuangan di Kecamatan Leuwiliang adalah metode Participatory Action



Research (PAR), karena PAR memungkinkan peneliti dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi local (Chambers, 1994). Rendahnya literasi keuangan di wilayah tersebut (38,5%) dan rendahnya persentase UMKM dengan pencatatan keuangan yang baik (12,3%) menunjukkan lemahnya efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi ekonomi mikro Islam (OJK, 2023). Layanan yang dikembangkan oleh Lahamid menekankan bahwa pencatatan keuangan yang layak bukan hanya persyaratan administratif, tetapi merupakan prasyarat untuk mewujudkan keadilan ekonomi Islam yang mengedepankan asumsi falah (kesejahteraan menyeluruh) (Lahamid, 2018). Oleh karena itu, metode PAR tidak hanya merespons “hambatan struktural dalam mencapai kemakmuran ekonomi kolektif” sebagaimana dikemukakan oleh Lahamid (Lahamid, 2018), tetapi juga menyediakan model pemberdayaan berkelanjutan berdasarkan temuan empiris mengenai hubungan positif antara pendampingan keuangan syariah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di komunitas pedesaan.

Paulo Freire (1921–1997) adalah seorang pendidik dan filsuf asal Brasil yang terkenal atas kontribusinya dalam pengembangan teori sosial kritis, terutama melalui bukunya yang berpengaruh *Pedagogy of the Oppressed* (1970). Tulisan Freire didasarkan pada pengalamannya bekerja dengan masyarakat miskin di Brasil, khususnya dalam kampanye literasi orang dewasa. Melalui pengalaman langsung tersebut, ia mengembangkan pendekatan pedagogis yang menekankan kesadaran terhadap ketidakadilan sosial dan perubahan struktural dalam masyarakat. Teori Freire sangat relevan bagi pemberdayaan UMKM, khususnya di sektor pangan, karena mempertimbangkan isu-isu utama terkait kesadaran, partisipasi, dan keadilan sosial. Tiga Pilar Utama dalam Teori Sosial Kritis Freire: Pertama, kesadaran kritis (*conscientização*) merupakan landasan fundamental dalam emansipasi sosial. Kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk secara reflektif mengevaluasi situasi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kondisi hidup mereka. Dalam konteks UMKM pangan, kesadaran kritis memungkinkan pelaku usaha memahami penyebab lemahnya akses modal, peran kebijakan pemerintah, ketimpangan struktur pasar, serta dampak globalisasi terhadap kelangsungan usaha kecil. Kedua, partisipasi adalah titik awal strategi Freire (Paulo Freire, 2005).

Freire menolak praktik pendidikan satu arah dan menekankan bahwa perubahan sosial harus menjadi proses aktif dari subjek. Dalam konteks UMKM, artinya pelaku usaha harus aktif terlibat dalam praktik pendampingan, diskusi kelompok, berbagi pengalaman, dan proaktif dalam mencari serta menciptakan solusi terhadap permasalahan usaha mereka. Aktivasi ini juga mencakup advokasi terhadap kebijakan publik yang lebih ramah terhadap kepentingan UMKM. Ketiga, prinsip pembebasan dari penindasan sosial menurut Freire menekankan bahwa kebebasan bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga perubahan struktural dari sistem yang menindas. Dalam UMKM pangan, kebebasan ini mencakup akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan daya tawar dalam rantai pasok pasar, dan



kemampuan untuk melawan praktik pasar yang eksploitatif seperti monopoli dan oligopoli. Tujuannya adalah menciptakan arena yang lebih seimbang bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha kecil dalam ruang ekonomi yang inklusif (Trisni Handayani et al., 2024).

Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa pembelajaran bukan hanya proses langsung dan pengalaman, tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, termasuk meniru dan mencontoh (Bandura, 1977). Dalam hal ini, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan baru dengan menyaksikan dan meniru orang lain yang dianggap sukses, kompeten, atau memiliki otoritas. Teori ini sangat relevan dengan UMKM sektor pangan dalam empat aspek utama. Pertama, perhatian (*attention*), yaitu sejauh mana pelaku usaha memperhatikan praktik manajemen keuangan yang ditunjukkan oleh pelaku lain yang dianggap berhasil. Penentu tingkat perhatian termasuk kesesuaian praktik dengan konteks bisnis mereka, kredibilitas model, dan tingkat kompleksitas informasi (Bandura, 1977).

Kedua, retensi (*retention*), yaitu kemampuan pelaku usaha untuk mengingat informasi yang mereka lihat. Proses ini dapat ditingkatkan melalui pengulangan, latihan, bantuan visual seperti buku kas sederhana, serta diskusi kelompok untuk memperkuat ingatan (Ormrod, 2016). Ketiga, reproduksi motorik (*motor reproduction*), yaitu tahap saat pelaku mencoba menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh, seperti mencatat transaksi harian, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta membuat anggaran rutin (Bandura, 2001). Keempat, motivasi (*motivation*), yaitu dorongan yang menginspirasi pelaku usaha untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Dorongan ini bisa berasal dari pengakuan rekan sesama pelaku usaha, peningkatan keuntungan yang diamati, serta pengakuan positif dari pendamping atau mentor program (Bandura, 2001).

Pendekatan Kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen pada 1980-an dan dikembangkan lebih lanjut oleh Martha Nussbaum pada awal abad ke-21 juga menjadi paradigma penting dalam pembangunan. Pendekatan ini dikembangkan sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional yang terlalu menekankan variabel makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita, yang dianggap tidak cukup untuk menggambarkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Sen menyatakan bahwa masalah seperti kelaparan tidak selalu disebabkan oleh kekurangan pangan, tetapi karena ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya. Ia kemudian mengembangkan konsep "kapabilitas," yaitu kemampuan nyata individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai (*valued functionings*) (Sen, 1999).

Pendekatan ini terdiri dari tiga komponen, yaitu kapabilitas, fungsi, dan kebebasan. Pertama, kapabilitas adalah kebebasan substantif untuk memilih dan mencapai berbagai kombinasi fungsi kehidupan yang mereka nilai. Fokusnya bukan pada kepemilikan barang, tetapi pada apa yang bisa dilakukan dengan sumber daya tersebut. Misalnya, kepemilikan sepeda tidak berarti mobilitas jika tidak bisa



digunakan atau tidak ada infrastruktur yang mendukung. Kedua, fungsi (functionings) adalah kondisi dan aktivitas kehidupan yang dapat dikendalikan individu, dari kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan kesehatan hingga aspek kompleks seperti partisipasi politik, harga diri, dan integrasi sosial. Ketiga, kebebasan mencakup kebebasan negatif (bebas dari tekanan) dan kebebasan positif (kemampuan efektif untuk bertindak dan memilih). Sen membedakan antara “kebebasan proses” (keadilan dalam pengambilan keputusan) dan “kebebasan peluang” (ragam pilihan yang tersedia bagi individu) (Sen, 2004). Pendekatan ini menggeser arah pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju penyebaran kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Teori pemberdayaan oleh Zimmerman (2000) dalam *Handbook of Community Psychology* menyatakan pentingnya membangun kemampuan individu dan kelompok untuk hidup secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan atau keterampilan, tetapi proses perubahan yang memungkinkan individu dan komunitas menemukan, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan kolektif mereka. Jika diterapkan pada UMKM di sektor pangan, pemberdayaan dapat dibahas dalam tiga dimensi yang saling terkait: pemberdayaan psikologis, organisasi, dan komunitas (Rappaport & Seidman, 2012).

Dimensi psikologis fokus pada peningkatan rasa percaya diri, efikasi diri, dan motivasi intrinsik pelaku UMKM. Program mentoring membantu meningkatkan keyakinan bahwa mereka mampu menjalankan dan mengelola usaha, termasuk manajemen keuangan. Zimmerman berargumen bahwa individu yang terberdayakan secara psikologis akan lebih kuat dalam menghadapi hambatan dan lebih berani mencari solusi. Pada saat yang sama, pemberdayaan organisasi mencakup pembangunan kapasitas kolektif melalui struktur bisnis, akses sumber daya, dan jaringan. Ini diwujudkan dalam pembentukan kelompok usaha, koperasi, atau asosiasi yang dapat memperkuat posisi tawar UMKM dalam pasar dan akses modal. Sementara itu, pemberdayaan komunitas merupakan ruang luas di mana pelaku UMKM ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi komunitas mereka, seperti forum bisnis lokal, advokasi keberlanjutan UMKM, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Rappaport & Seidman, 2012).

Berdasarkan berbagai pengamatan empiris, kondisi UMKM di Kecamatan Leuwiliang menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan keuangan yang diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan serta terbatasnya akses terhadap layanan akuntansi. Pencatatan keuangan yang buruk, pencampuran dana usaha dan pribadi, serta ketidakmampuan membuat laporan keuangan sederhana menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk berkembang secara profesional dan mengakses pembiayaan formal. Kesenjangan ini tidak hanya terkait dengan aspek keuangan, tetapi juga merupakan persoalan struktural dalam mewujudkan keadilan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan proses strategis dan inklusif yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian pelaku



usaha melalui sistem akuntansi yang sederhana dan relevan secara kontekstual. Proses Participatory Action Research (PAR) diyakini dapat menjawab kebutuhan ini karena melibatkan pelaku UMKM sebagai agen perubahan secara aktif dan menciptakan proses pendampingan yang berkelanjutan serta berpusat pada pengembangan subjek pengabdian.

2. Metode

Participatory Action Research (PAR) berasal dari paradigma konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa realitas pengetahuan merupakan konstruksi sosial yang berasal dari interaksi sosial dan pengalaman praktis bersama. Paradigma ini bertujuan untuk menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam proses pengabdian kepada masyarakat untuk meneliti dan memahami realitas sosial yang kompleks (Bradbury, 2016). Epistemologi dari PAR menekankan pada pengetahuan yang terlibat (*engaged*) dan berorientasi pada tindakan. Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pengamatan atau analisis, tetapi juga melalui pengalaman dalam mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Kemmis et al., 2016). PAR menjunjung nilai-nilai partisipasi, pemberdayaan, keadilan, dan transformasi sosial. Proses teknis dari PAR melibatkan serangkaian langkah partisipatif seperti pemetaan masalah, perencanaan aksi bersama, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi partisipatif untuk menciptakan transformasi sosial yang diinginkan (Stringer, 2014). Metode Participatory Action Research (PAR) merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian langkah yang membutuhkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan. Langkah-langkah tersebut adalah:

a. Tahap Persiapan dan Pengenalan

Tahap awal dari program pengabdian masyarakat ini difokuskan pada membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan utama di Kecamatan Leuwiliang, terutama para pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Kegiatan dimulai dengan kunjungan lapangan untuk membangun kepercayaan dan memperoleh pemahaman kontekstual mengenai situasi sosial ekonomi masyarakat setempat. Identifikasi kebutuhan masing-masing pelaku UMKM dilakukan secara informal dan melalui observasi langsung, yang kemudian dijadikan dasar dalam membentuk tim kolaboratif. Anggota tim terdiri dari akademisi atau fasilitator (penyedia layanan masyarakat), perwakilan UMKM (seperti ketua kelompok), dan pejabat pemerintah desa atau organisasi terkait sebagai mitra strategis.

b. Asesmen Partisipatif Awal

Langkah kedua untuk memahami kondisi umum praktik pembukuan UMKM dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions / FGD*) secara partisipatif. Dalam forum ini, para pemangku kepentingan UMKM menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti rendahnya tingkat literasi, keterbatasan waktu, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip dasar akuntansi. Selain itu, metode visual seperti pemetaan partisipatif dan kalender musiman digunakan untuk mengetahui siklus usaha dan arus kas



sepanjang tahun. Hal ini membantu dalam merancang sistem akuntansi yang lebih responsif terhadap dinamika lokal.

c. **Perencanaan Bersama**

Temuan dari tahap analisis digunakan sebagai dasar dalam lokakarya perencanaan partisipatif untuk merancang sistem pencatatan keuangan yang kontekstual. Dalam proses ini, para peserta bersama-sama menyusun kerangka pencatatan sederhana seperti buku kas, catatan piutang dan utang, serta laporan laba rugi dasar. Istilah-istilah akuntansi diubah ke dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami. Peserta juga memilih alat pencatatan yang sesuai dengan gaya pribadi dan kemampuan teknis mereka, seperti buku catatan manual, perangkat lunak sederhana, atau template Excel. Hasil konkret dari tahap ini adalah terbentuknya "Buku Kas UMKM Leuwiliang" lengkap dengan ilustrasi edukatif.

d. **Penyusunan Rencana Aksi dan Pelaksanaan**

Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi yang mencakup jadwal pendampingan, tujuan UMKM, dan indikator kinerja seperti persentase usaha yang mampu memantau transaksi harian secara mandiri. Peran dalam implementasi juga dibagi secara fungsional, rekan sejawat menangani aspek teknis, dan kader UMKM menjadi agen perubahan internal. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap: dimulai dengan pencatatan transaksi dasar, kemudian simulasi laporan bulanan, dan terakhir pengenalan analisis sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan. Strategi door-to-door dan pembelajaran antarsejawat diterapkan untuk menjangkau UMKM yang mengalami kendala dalam mengikuti pelatihan kelompok.

e. **Strategi Keberlanjutan Program**

Salah satu strategi keberlanjutan program adalah melatih kader UMKM agar mampu menjadi fasilitator lokal dan mendampingi pelaku usaha lainnya. Modul pelatihan dirancang agar dapat digunakan secara mandiri baik oleh kader maupun oleh pelaku UMKM baru. Integrasi dengan lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes atau koperasi juga dilakukan agar layanan pencatatan keuangan dapat berlanjut secara kelembagaan. Selain itu, UMKM juga difasilitasi untuk mengakses pelatihan lanjutan atau pembiayaan mikro dengan menggunakan catatan keuangan sebagai dasar penilaian, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi praktik akuntansi yang berkelanjutan.

f. **Dokumentasi dan Diseminasi Pengetahuan**

Seluruh proses Participatory Action Research (PAR) didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk buku panduan bergambar dan materi audiovisual dengan menggunakan bahasa lokal, agar informasi mudah diakses oleh masyarakat setempat. Hasil dan dampak program dilaporkan melalui berbagai media, termasuk internet, forum diskusi antardesa, dan laporan kepada pemerintah daerah. Program ini tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan praktik terbaik, tetapi juga memberikan landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat pemerintah daerah.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya untuk mendiseminasikan pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Semua kegiatan ini seharusnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik secara ekonomi dalam konteks kegiatan usaha, perubahan kebijakan, maupun transformasi sosial (perilaku). Kegiatan pengabdian masyarakat terbukti berhasil membawa perubahan baik di tingkat individu maupun kelembagaan, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program pengabdian masyarakat ini berhasil dilaksanakan berkat kolaborasi antara tim staf Program Studi Perbankan Syariah di Institut Ummul Quro Al Islami Bogor dengan para pelaku UMKM berbasis pangan di Kecamatan Leuwiliang. Para pihak yang terlibat aktif dalam proses ini turut berperan dalam pendaftaran dan koordinasi peserta pelatihan serta penyediaan fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, sistem suara, dan peralatan pendukung lainnya selama pelatihan berlangsung.

Evaluasi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan berdasarkan rekomendasi dan komentar dari mitra lapangan. Kegiatan pelatihan ini menggunakan kerangka *Participatory Action Research* (PAR) yang dimulai dengan pengisian Kuesioner Identifikasi Masalah, dilanjutkan dengan tahap Perencanaan dan Desain, serta Pengembangan Panduan Implementasi untuk penerapan manajemen keuangan dan bisnis pada UMKM pangan. Selain itu, disusun juga Panduan Praktis guna mendukung implementasi manajemen keuangan dalam praktik sehari-hari. Proses ini disempurnakan melalui observasi langsung terhadap penggunaan panduan oleh peserta UMKM, dan ditutup dengan sesi Refleksi Partisipatif serta Evaluasi Program.

Setiap tahapan kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (FGD), tanya jawab, simulasi, dan praktik pengalaman langsung dalam manajemen usaha dan pelaporan keuangan. Tujuan akhirnya adalah agar pelaku UMKM mampu mempelajari dan menerapkan sistem akuntansi sederhana secara mandiri dan berkelanjutan dalam usaha masing-masing.

a. Tahap Persiapan dan Pengenalan

Tahapan persiapan dan pengenalan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses PAR. Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke beberapa desa di Kecamatan Leuwiliang untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan kolaboratif yang adil antara pelaku UMKM dan tim pengabdian. Kunjungan tersebut bukan hanya untuk menyosialisasikan rencana program, tetapi juga untuk mempelajari realitas lapangan dari usaha pangan, baik dari segi operasional maupun praktik manajemen keuangan. Dalam proses ini, tim pengabdian juga berhasil membuka saluran komunikasi dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta perwakilan dari lembaga atau instansi pemerintah terkait untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci yang perlu dilibatkan dalam proses pendampingan.



Selanjutnya dilakukan asesmen partisipatif melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para pelaku UMKM. Hasil diskusi memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pencatatan keuangan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan waktu dan tenaga, serta minimnya pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi. Pelaku UMKM juga diberikan ruang untuk menyampaikan harapan dan prioritas mereka terhadap sistem pencatatan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Untuk memahami konteks lokal lebih dalam, tim pengabdian menggunakan alat visual partisipatif seperti pemetaan usaha dan kalender bisnis musiman untuk mengidentifikasi pola aktivitas usaha, pengeluaran, dan siklus pendapatan. Semua langkah ini saling melengkapi dalam mengumpulkan informasi, membentuk kesadaran kritis pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan keuangan, dan menyediakan landasan kuat untuk perencanaan sistem akuntansi yang sederhana namun sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

b. Asesmen Partisipatif Awal

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan yang baik dan masih mengandalkan ingatan atau catatan seadanya dalam menjalankan aktivitas rutin. Oleh karena itu, langkah kedua adalah menyelenggarakan lokakarya partisipatif dengan para pelaku UMKM. Dalam lokakarya ini, fasilitator memandu diskusi kelompok untuk secara bersama-sama mengembangkan sistem akuntansi sederhana yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal. Desain sistem akuntansi sederhana mencakup tiga aspek utama:

- 1) Format pencatatan seperti buku kas harian, catatan utang-piutang, dan laporan laba-rugi sederhana,
- 2) Penyederhanaan istilah akuntansi ke dalam bahasa lokal (misalnya istilah "arus kas" disederhanakan menjadi "catatan keluar-masuk uang"), dan
- 3) Penggunaan alat bantu pencatatan berdasarkan tingkat literasi dan akses teknologi peserta. Beberapa peserta menggunakan buku tulis karena tidak memiliki akses ke gawai, sementara lainnya dibantu dengan template Excel atau aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis Android.

Sebagai hasil konkret dari tahap ini, dikembangkan "Buku Kas UMKM Pangan Leuwiliang", sebuah modul visual yang membantu pelaku UMKM mencatat transaksi harian, piutang dan utang, serta menghitung laba-rugi bulanan. Buku ini mencakup contoh kasus yang mudah dipahami, panduan penggunaan, dan kolom isian yang disesuaikan dengan usaha peserta seperti usaha makanan rumahan, pedagang kaki lima, dan penjual minuman kemasan. Modul ini bisa dicetak atau diakses secara digital sehingga memungkinkan penggunaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pelaku UMKM.

c. Perencanaan Bersama

Tahapan ini dimulai dengan pertemuan yang melibatkan tim pengabdian, anggota UMKM, dan aparat desa untuk menyepakati jadwal pendampingan yang realistis dan adaptif sesuai dengan hari operasional pelaku usaha. Melalui diskusi terbuka,



disepakati bahwa pendampingan akan dilakukan dalam tiga bulan dengan sesi mingguan dan pertemuan monitoring rutin. UMKM sasaran ditentukan berdasarkan kesediaan untuk berpartisipasi, ragam jenis usaha, dan lokasi, dengan 25 pelaku usaha mikro yang siap berpartisipasi aktif dalam proses. Selanjutnya, indikator keberhasilan ditetapkan secara partisipatif, dengan indikator utama adalah bahwa 80% pelaku UMKM mampu mencatat pengeluaran dan pendapatan harian secara berkelanjutan menggunakan sistem akuntansi sederhana yang telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Indikator kedua adalah pemahaman dasar tentang penyusunan laporan keuangan dan kemampuan kader lokal dalam membimbing pelaku usaha lainnya. Mengenai distribusi peran, tim relawan berperan sebagai fasilitator teknis yang menyusun modul pelatihan, merangkum materi akuntansi, dan memfasilitasi pembelajaran partisipatif. Perwakilan UMKM kemudian ditunjuk sebagai “kader akuntansi,” yaitu individu yang dianggap memiliki minat belajar lebih tinggi serta kepemimpinan akar rumput di masyarakat, dan mereka dilatih secara intensif untuk memimpin rekan sesama pelaku usaha.

d. Penyusunan Rencana Aksi dan Pelaksanaan

Tahapan implementasi partisipatif dalam kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan bersamaan, dengan menekankan keterlibatan aktif pelaku UMKM selama proses pembelajaran dan penerapan sistem akuntansi sederhana. Tahap awal adalah pelatihan bertahap yang dibagi ke dalam tiga fase utama. Fase 1 dimulai dengan pelatihan awal yang mencakup pencatatan transaksi harian, seperti pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan pengelolaan stok. Dalam pelatihan ini, pelaku UMKM diajarkan cara menggunakan buku kas sederhana yang mudah digunakan dan telah disesuaikan dengan situasi masing-masing usaha mereka. Tujuannya adalah untuk membiasakan pelaku UMKM mencatat setiap transaksi secara rutin sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan.



Gambar 2 Pelatihan dasar pencatatan transaksi harian

Selanjutnya, pada Tahap 2 dilakukan simulasi penyusunan laporan keuangan bulanan. Peserta diberikan contoh dan template yang mudah disesuaikan, dan mereka diminta untuk mempresentasikan laporan berdasarkan data transaksi yang telah



mereka catat sebelumnya. Pendekatan ini merupakan praktik langsung berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang mendorong pemahaman lebih mendalam terhadap struktur laporan keuangan seperti laporan laba rugi dasar dan laporan arus kas. Kemudian dilanjutkan dengan Tahap 3, yaitu analisis keuangan sederhana untuk pengambilan keputusan usaha, yang mencakup perhitungan margin keuntungan, efisiensi biaya, dan penentuan harga jual yang sesuai. Hal ini penting agar pelaku UMKM tidak hanya belajar mencatat dan menyusun laporan, tetapi juga mampu menelaah informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

Selama masa uji coba implementasi, pelaku UMKM diminta untuk menerapkan sistem akuntansi yang dikembangkan selama satu hingga dua bulan. Monitoring secara berkelanjutan dilakukan oleh tim pendamping untuk mengevaluasi sejauh mana konsep dan kapasitas akuntansi telah terintegrasi dalam operasional harian usaha. Selanjutnya, untuk UMKM sejenis seperti kelompok tani atau pengrajin, diperkenalkan konsep buku besar bersama (*shared ledger*) sebagai sarana untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas kelompok. Buku besar bersama ini tidak hanya berfungsi untuk transparansi, tetapi juga mendorong kerja sama usaha, pengakuan terhadap biaya kolektif, dan pembelajaran dari praktik terbaik yang tercipta melalui proses pencatatan.

e. Strategi Keberlanjutan Program

Selanjutnya, modul pelatihan yang berasal dari konteks lokal dikembangkan dan tersedia secara langsung bagi pelaku UMKM, baik dalam bentuk cetak maupun versi elektronik, sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan. Tahap ini juga melibatkan integrasi dengan lembaga lokal untuk memperkuat ekosistem praktik akuntansi berkelanjutan. Kemitraan dibangun dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa, yaitu institusi strategis di bidang ekonomi yang memiliki kapasitas operasional dan jaringan luas di tingkat lokal.



Gambar 3 Integrasi dengan lembaga local bumdes dan koperasi desa

Analisis lapangan menegaskan bahwa pendekatan PAR pada tahap ini mampu menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem akuntansi dasar yang telah dibangun. Upaya



kolaboratif antara fasilitator, pelaku UMKM, dan lembaga lokal menunjukkan bahwa perubahan sistem bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga sosial, karena berhasil membentuk jaringan pembelajaran berkelanjutan dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memperkuat keberlanjutan dalam konteks pengabdian masyarakat tidak hanya bergantung pada intervensi eksternal, tetapi juga pada sejauh mana komunitas lokal berperan aktif sebagai subjek perubahan.

f. Dokumentasi dan Diseminasi Pengetahuan

Proses pencatatan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan UMKM sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses pembelajaran dan pencatatan. Prosedur diskusi kelompok terfokus (FGD), pelatihan, praktik pembukuan dasar, serta pemantauan dan evaluasi partisipatif didokumentasikan dalam sebuah buku panduan bergambar yang menggunakan pendekatan visual guna memudahkan pemahaman oleh pelaku UMKM dengan tingkat literasi akuntansi yang beragam. Untuk menunjang aksesibilitas, terutama bagi masyarakat setempat yang lebih nyaman dengan bahasa daerah, juga disediakan video tutorial yang menampilkan praktik langsung pencatatan keuangan berbasis kas sederhana. Materi ini bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pelatihan berkelanjutan yang dapat langsung digunakan oleh UMKM secara mandiri maupun dalam pelatihan lanjutan.

3.2. Pembahasan

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) di Kecamatan Leuwiliang menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM makanan. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) terbukti efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM, yang terlihat dari peningkatan literasi keuangan, penerapan pencatatan transaksi harian, dan kemampuan menyusun laporan keuangan dasar seperti laba rugi dan arus kas. Pendampingan ini juga berhasil meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan memperkuat efisiensi usaha. Pelatihan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pencatatan transaksi dasar hingga analisis keuangan sederhana, serta penggunaan modul visual seperti "Buku Kas UMKM Pangan Leuwiliang", turut berkontribusi pada pencapaian ini. Kemitraan dengan BUMDes dan koperasi desa juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan program dan memfasilitasi akses UMKM ke pelatihan lanjutan serta pembiayaan mikro.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil membangun kemandirian finansial bagi UMKM di Kecamatan Leuwiliang dan menciptakan ekosistem pembelajaran komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif, mulai dari identifikasi masalah hingga dokumentasi dan diseminasi pengetahuan, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas teknis UMKM serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Inovasi dalam penyebaran informasi melalui buku panduan bergambar dan video tutorial juga memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan proses pembelajaran bagi pelaku UMKM dengan tingkat literasi yang beragam. Program ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga



memberdayakan UMKM untuk menjadi agen perubahan bagi diri mereka sendiri dan komunitasnya.

Tabel I Pencapaian Kegiatan

No	Indikator	Persentase Pencapaian	Keterangan
1	Peningkatan literasi keuangan UMKM	Efektif meningkat	Pendampingan meningkatkan pemahaman UMKM tentang pengelolaan keuangan.
2	Penerapan pencatatan transaksi harian	Efektif diterapkan	Pelaku UMKM mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, dan mengelola stok secara rutin.
3	Kemampuan menyusun laporan keuangan dasar (laba rugi, arus kas)	Efektif meningkat	UMKM mampu menyusun laporan laba rugi dan arus kas sederhana.
4	Peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan	Meningkat	Pendampingan membantu UMKM mengakses sumber pembiayaan formal.
5	Peningkatan efisiensi usaha	Memperkuat	Pengelolaan keuangan yang lebih baik berkontribusi pada efisiensi operasional.
6	Pelaku UMKM mampu mencatat pengeluaran dan pendapatan harian secara mandiri	80%	Indikator utama keberhasilan program yang ditetapkan secara partisipatif.
7	Pemahaman dasar tentang penyusunan laporan keuangan dan kemampuan kader lokal dalam membimbing pelaku usaha lainnya	Tercapai	Kader UMKM dilatih untuk menjadi fasilitator lokal dan membantu pelaku usaha lain.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan di Kecamatan Leuwiliang berhasil dijalankan secara partisipatif dan kolaboratif oleh tim dosen Program Studi Perbankan Syariah Institut Ummul Quro Al Islami Bogor bersama pelaku UMKM pangan. Capaian program ini didorong oleh sinergi yang kuat antara peserta dan fasilitator, mulai dari tahap pemetaan kebutuhan lokal hingga keberlanjutan melalui koneksi dengan lembaga desa. Pendampingan dilakukan melalui berbagai strategi seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), ceramah interaktif, simulasi, dan pendampingan satu-satu, yang terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM. Hadirnya sistem akuntansi sederhana



dan kontekstual mendorong pelaku usaha untuk mencatat, mengonsolidasi, dan merangkum laporan keuangan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan usaha. Aktivitas pencatatan dan berbagi pengetahuan dilakukan secara inovatif dalam bentuk buku panduan bergambar dan video, yang disebarluaskan melalui media sosial, pelatihan antardesa, serta laporan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Hasil dari seluruh tahapan kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan PAR tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas teknis UMKM, tetapi juga mengembangkan sistem pembelajaran berkelanjutan berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Institut Ummul Quro Al Islami Bogor atas dukungan dan kolaborasi aktif dalam program pengabdian masyarakat ini, khususnya staf Program Studi Perbankan Syariah yang telah bersinergi dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pejabat Kecamatan Leuwiliang yang telah menjadi mitra strategis dan memfasilitasi kegiatan, serta kepada seluruh pelaku UMKM makanan di Kecamatan Leuwiliang atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan komitmen mereka dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi sistem akuntansi sederhana yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al Arif, S. (2023). Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah Untuk UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Di Komunitas Lokal. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 4(4), 164–171.
- Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Bandura, Albert. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Bradbury, Hilary. (2016). *The SAGE handbook of action research*. SAGE Publications, Credo Reference.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Gigih, Y., Syafrial, S., Toiba, H., & Retnoningsih, D. (2023). Financial Literacy and Its Impact on the Income Level of Chili Farmers in Rural Indonesia. *HABITAT*, 34(1), 13–22. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2023.034.1.2>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Profil UMKM Kabupaten Bogor: Analisis Perkembangan dan Tantangan*.
- Kemmis, Stephen., McTaggart, Robin., & Nixon, Rhonda. (2016). *The action research planner : doing critical participatory action research*. Springer.



- Lahamid, Q. (2018). Hambatan dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992>
- Makki, I. (2022). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 868–879. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2188>
- Mutiah, R. A. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 223. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21000>
- OJK. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023: Analisis Regional Jawa Barat*.
- Ormrod, J. E. (2016). *Human Learning* (7th ed.). Pearson.
- Paulo Freire. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Purwanti, H., & Yuliati, A. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 207–224. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2355>
- Rahman, A. (2024). *Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2024*.
- Rahman Hakim, A., Narulita, S., & Iswahyudi, M. (2024). Digitalisasi Pencatatan Keuangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM): Perluakah? *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 331–337. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p331-337>
- Rappaport, Julia., & Seidman, Edward. (2012). *Handbook of Community Psychology*.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Anchor Books.
- Sen, Amartya. (2004). *Rationality and freedom*. Belknap Press.
- Soedarwo, V. S. D., Hayat, M., & Juliati, R. (2022). IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) IN THE DISASTER RESILIENT TOURISM VILLAGE EMPOWERMENT PROGRAM. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 279. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2462>
- Stringer, E. T. . (2014). *Action research*. SAGE.
- Trisni Handayani, Kholifaturrossidin Kholifaturrossidin, Firman Ihsan Herditya, & Muhammad Ammar Fadgham. (2024). Pendampingan Usaha Mikro dalam Upaya Meningkatkan Penjualan melalui Digitalisasi. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 85–93. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.799>